

Dr. Tedi Sudrajat, S.H., M.H.

HUKUM BIROKRASI PEMERINTAH

Kewenangan & Jabatan

		PERPUSTAKAAN	
No. INV.	046/mhk/19/c-1		
Th. Angg.	2019	Cat	C-1
PARAP	<i>Bm</i>	TGL	16/07/2019



Penerbit

SINAR GRAFIKA

Daftar Isi

PRAKATA	v
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Pentingnya Pemahaman terhadap Hubungan Kewenangan, Wewenang dan Jabatan dalam Hukum Birokrasi Pemerintah	4
C. Bingkai Buku	13
BAB 2 HUKUM DAN BIROKRASI PEMERINTAH	18
A. Hakikat Birokrasi	18
B. Birokrasi dalam Sistem Administrasi	29
C. Fungsi Hukum dalam Birokrasi	32
D. Hubungan Hukum Administrasi dengan Birokrasi Pemerintah di Indonesia	39
E. Birokrasi Pemerintah dalam Sistem Kepegawaian di Indonesia	42
BAB 3 KEWENANGAN DALAM BIROKRASI PEMERINTAH	52
A. Hakikat Kewenangan	52
B. Sumber-Sumber Kewenangan	56

C. Hubungan Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Birokrasi Pemerintah	58
BAB 4 JABATAN DALAM BIROKRASI PEMERINTAH	75
A. Hakikat Jabatan	75
B. Konsep Pengisian Jabatan Birokrasi Pemerintah	91
C. Prinsip Meritokrasi dalam Pengisian Jabatan	95
BAB 5 PRAKTIK PENGISIAN JABATAN BIROKRASI DI DAERAH	100
A. Persoalan Kewenangan dalam Pengisian Jabatan Pemerintah	100
B. Persoalan Proses Pengisian Jabatan Pemerintah	117
C. Persoalan Netralitas dalam Pengisian Jabatan Pemerintah	141
D. Pola Pengisian Jabatan Pemerintah Berbasis Merit	155
BAB 6 REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH	159
A. Arah Kebijakan dalam Birokrasi Pemerintah	159
B. Pentingnya Hukum dalam Reformasi Birokrasi Indonesia	164
C. Reformasi Birokrasi yang Berorientasi pada Citizens Charter	171
D. Pengawasan Birokrasi Pemerintah melalui Ombudsman Republik Indonesia	181
DAFTAR PUSTAKA	189
PROFIL PENULIS	199